

Persepsi Nelayan Terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Masa Pandemi Covid-19 (Kasus Desa Kalumpangloe Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto)**Fishermen's Perception of Direct Cash Assistance during The Covid-19 Pandemic (Kalumpangloe Village Case of Arungkeke Subdistrict Jeneponto)**Syuhardiman Bahtiar¹, Andi Adri Arief², Arie Syahrini Cangara²¹Mahasiswa Program Studi Agrobisnis Perikanan, Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas²Dosen Program Studi Agrobisnis Perikanan Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin

e- corresponding author : syuhardimanb@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi nelayan terhadap bantuan langsung tunai di Desa Kalumpangloe Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto saat pandemi Covid-19. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga Maret 2021 di Desa Kalumpangloe Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Non-Probability Sampling*. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kuantitatif dan kualitatif. Sementara untuk analisis data kuantitatif digunakan skala likerts untuk mengetahui persepsi yang nelayan terhadap BLT. Mekanisme implementasi BLT dimulai dari tahap sosialisasi, verifikasi data, penginformasian, pencairan dan evaluasi. Persepsi nelayan Desa Kalumpang Loe Kabupaten Jeneponto diperoleh melalui 4 indikator dimana diketahui bahwa masyarakat desa ini menganggap jika BLT itu sangat bermanfaat sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun tidak digunakan sebagai modal usaha. Proses penyaluran BLT tidak sesuai dengan waktu perjanjian serta ketepatan sasaran penerima BLT sudah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan pemerintah. Pengalokasian BLT oleh masyarakat Desa Kalumpangloe adalah sebanyak 55% untuk kebutuhan pangan, 8% untuk kebutuhan sandang, 4% untuk kebutuhan papan, 14% digunakan sebagai modal usaha, 17% digunakan untuk biaya pendidikan anak, serta 2% untuk alokasi lainnya. Dimana besaran pencairan dana BLT adalah Rp.300.000/bulan

Kata kunci: Persepsi nelayan, bantuan langsung tunai (BLT), covid-19

Abstract

This study aims to determine Fishermen's perceptions of cash transfers in Kalumpangloe Village, Arungkeke District, Jeneponto Regency during the pandemic. This research was conducted from February to March 2021 in Kalumpangloe Village, Arungkeke District, Jeneponto Regency, South Sulawesi. The method that we used is *Non-Probability Sampling*. The data source that we used are primary data and secondary data. The data analysis method used in this research is quantitative and qualitative. Meanwhile, for quantitative data analysis, the Likerts scale was used to determine the fishermen's perception of cash transfer. Cash transfers implementation mechanism starts from the stage of socialization, data verification, information, disbursement and evaluation. Perceptions of fishermen in Kalumpang Loe Village, Jeneponto Regency, obtained through 4 indicators, it's known that the village community considers that cash transfers is very useful as assistance to provides their necessities, but they didn't use to provides business fund. The process of sending cash transfers was not filled the promised time and the target, and also the target of cash transfers recipients that is set by the government already reaches it's target. The allocation of cash transfers by the people of Kalumpangloe Village is as much as 55% for food needs, 8% for clothing needs, 4% for housing needs, 14% used as bussines fund, 17% used for children's education costs, and 2% for other allocations. Where the amount of cash transfers funds is IDR 300,000/month.

Keywords : Fishermen's perception, direct cash assistance (BLT), covid-19

Pendahuluan

Awal tahun 2020, Pandemi Covid-19 menjadi masalah dunia. Seluruh pemerintahan di dunia bahkan ada yang kewalahan namun terus berupaya mengatasi penyebaran virus ini, sekaligus mengatasi berbagai dampaknya. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 adalah faktor perekonomian. Di Indonesia tidak terkecuali, akibat pandemik ini perekonomian masyarakat menjadi menurun. Mengatasi hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan *refocusing* anggaran dari berbagai pos anggaran yang ada. Salah satu contoh pos anggaran yang mengalami *refocusing* adalah danadesa. Dana desa yang sebenarnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan desa, dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa).

Di sektor perikanan, pandemi COVID-19 telah mempengaruhi keberlangsungan aktivitas produksi dan pemasaran hasil perikanan. Rantai pasok komoditas perikanan terjadi penurunan permintaan ekspor di Indonesia sebesar 10-20 persen. Kondisi ini disebabkan banyak restoran tutup dan kebijakan pembatasan ekspor di berbagai negara, seperti di Amerika Serikat dan Tiongkok (Widyastuti, 2020). Sebanyak 26.675 Rumah Tangga Perikanan (RTP) terdampak COVID-19, baik karena harga ikan yang anjlok maupun pemasaran untuk ekspor yang tertutup (Efrizal, 2020). Selain itu, kebijakan penutupan beberapa daerah juga mempengaruhi penyerapan hasil produksi perikanan para nelayan. Nelayan di beberapa daerah mengalami kesulitan dalam menjual ikan dan mendapatkan harga yang pantas.

Nelayan pesisir pantai di Desa Kalumpangloe Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto mencari ikan di laut sebagai mata pencaharian utamanya, Mereka bekerja keras untuk memperbaiki kesejahteraan hidup mereka sebagai bagian dari proses perubahan sosial budayanya. Berbagai upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mewujudkan suatu perubahan sosial dalam kehidupannya, di antaranya didasarkan pada berbagai bentuk mata pencaharian yang digelutinya dalam kehidupan mereka sehari-hari serta standar nilai yang ada dalam masyarakat (Saleh,2019).

Desa Kalumpangloe Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu desa di Sulawesi Selatan yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemik Covid-19, sebagian besar masyarakat di kecamatan ini memiliki pekerjaan sebagai nelayan skala kecil dan tradisional. Menjadi nelayan dipandang oleh masyarakat di desa ini adalah pilihan pekerjaan satu-satunya yang dapat mereka lakukan. Dimasa pandemi Covid-19 ini, para nelayan di desa ini sangat merasakan dampak pada perekonomiannya,hal ini dikarenakan turunnyaharga ikan dipasar, dan banyaknya pasar yang tertutup dikarenakan kebijakan pemerintah memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Oleh karena itu, dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam program danadesa yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menganggarkan dana bantuan langsung sebesar 25%dari

total anggaran dana desa yang akan diterima, dan dana yang didapatkan masyarakat sebesar Rp.300.000/Kepala rumah tangga. Pada dasarnya, prinsip bantuan ini adalah untuk melengkapi serangkaian program jaring pengaman sosial yang telah ditetapkan pemerintah seperti PKH, Bantuan Sembako, dan Diskon listrik. Bedanya, skema BLT Dana Desa ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah desa untuk menentukan sendiri calon penerima bantuan secara partisipatif melalui Musyawarah Desa. Diharapkan masyarakat penerima menggunakan dana sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan pokok atau primernya.

Metode Penelitian

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga Maret 2021 di Desa Kalumpangloe Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan pertimbangan pada daerah yang memungkinkan untuk melakukan studi mendalam tentang analisis persepsi nelayan terhadap bantuan langsung tunai dengan dasar pertimbangan metodologis berdasarkan survey yang dilakukan, yakni : (1) Desa Kalumpangloe Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto memiliki sejumlah masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai Nelayan; dan (2) Terdapat penyaluran Bantuan Langsung Tunai pada masyarakat.

Metode Penelitian

Metode dasar dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian ini didasarkan bahwa untuk mengungkapkan bagaimana analisis persepsi nelayan dan bagaimana mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap bantuan langsung tunai kepada nelayan, maka dari itu diperlukan pemahaman atas hal-hal yang terjadi dalam kehidupan nelayan dalam program bantuan langsung tunai ini serta pandangan mereka terkait bantuan langsung tunai ini, maka dari itu diperlukan pemahaman mendalam untuk mengetahui mengenai hal tersebut.

Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan adalah seluruh nelayan Kalumpangloe Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Non-Probability Sampling*. Model *non probability sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan dengan menetapkan kriteria-kriteria tentang karakteristik sampel yang diteliti sesuai dengan rumusan penelitian. Maka dari itu kriteria yang digunakan adalah nelayan yang memperoleh Bantuan Langsung Tunai. Sehingga total sampel pada penelitian ini didapatkan sebanyak 40 orang.

Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : analisis data kuantitatif dan kualitatif. Analisis pertama untuk mengetahui dan menjawab rumusan masalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif melalui penafsiran dan pemahaman (*interpretative understanding*) atau *verstehen*. Data hasil wawancara dan pengamatan ditulis dalam suatu catatan lapangan yang terinci kemudian dianalisis secara kualitatif. Untuk memperoleh data yang akurat, maka dibuat catatan lapangan yang selanjutnya disederhanakan/ disempurnakan. Data yang diperoleh dianalisis secara komponensial (*componetial analysis*) dengan melalui tiga tahap:

Tahap pertama, analisis data kualitatif yang dilakukan adalah proses reduksi data kasar dari catatan lapangan. Dalam prosesnya, dipilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Proses reduksi data dilakukan bertahap selama dan sesudah pengumpulan data sampel tersusun. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan data, menelusuri tema tersebar, dan membuat kerangka dasar penyajian data.

Tahap kedua, penyajian data, yaitu penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk teks naratif, mulanya terpecah dan terpisah pada berbagai sumber informasi, kemudian diklasifikasikan menurut tema dan kebutuhan analisis.

Tahap ketiga Untuk mengetahui persepsi nelayan terhadap Bantuan Langsung Tunaidi Desa Kalumpangloe Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto digunakan skala *Likert*, kriteria ini digunakan untuk menentukan kategori persepsi (Irawan, at, al 2017).

Tahap keempat, penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data. Penarikan kesimpulan berlangsung bertahap dari kesimpulan umum pada tahap reduksi data, kemudian menjadi lebih spesifik pada tahap penyajian data, dan lebih spesifik lagi pada tahap penarikan kesimpulan yang sebenarnya. Rangkaian proses ini menunjukkan bahwa analisis data kualitatif dalam penelitian ini bersifat menggabungkan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang dan bersiklus. Data lapangan yang terkumpul, dikelompokkan dan di klasifikasikan. setelah itu, diseleksi dengan mempertimbangkan antara satu variabel dengan variable lainnya.

Sementara untuk analisis data kuantitatif digunakan skala likerts untuk mengetahui persepsi yang nelayan terhadap BLT. Adapun skala likerts yang digunakan dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1. Skala Pengukuran Persepsi Nelayan terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT)

No	Variabel	Kriteria	Skor
1	Pemenuhan Kebutuhan Dasar		
	Kurang Tepat	BLT belum dapat memenuhi kebutuhan dasar	1
	Cukup Tepat	BLT cukup membantu memenuhi kebutuhan	2
	Sangat Tepat	BLT sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan	3
2	BLT sebagai modal usaha		
	Kurang Tepat	BLT tidak digunakan sebagai modal usaha	1
	Cukup Tepat	Sebagian BLT digunakan sebagai modal usaha	2
	Sangat Tepat	BLT digunakan sebagai modal usaha	3
3	Proses penyaluran		
	Kurang Tepat	Proses penyaluran BLT tidak sesuai dengan perjanjian, memerlukan banyak syarat, sangat lama dan bertele-tele	1
	Cukup Tepat	Waktu pencairan tidak sesuai dengan perjanjian	2
	Sangat Tepat	Waktu pencairan sudah sesuai dengan perjanjian	3
4	Ketepatan sasaran		
	Kurang Tepat	Tidak tepat sasaran	1
	Cukup Tepat	Sudah tepat sasaran	2
	Sangat Tepat	Sangat tepat sasaran	3

Range untuk jawaban responden berdasarkan tingkat kepentingan adalah:

- Nilai/skor terkecil yang mungkin diperoleh adalah 40 dengan asumsi bahwa semua responden (40 orang) memberikan jawaban kurang penting (skor 1) terhadap indikator-indikator BLT.
- Nilai/skor terbesar yang mungkin diperoleh adalah 120 dengan asumsi bahwa semua responden (40 orang) memberikan jawaban sangat penting (skor 3) terhadap indikator bauran pemasaran.

Menurut Sunarti (2004) dalam Lingga (2008) besar range untuk tiap kelas adalah

$$\frac{120-40}{3} = 27$$

Maka pembagian skor yang akan diperoleh mengenai persepsi nelayan terhadap BLT.

Tabel 2. Hasil skor penilaian persepsi nelayan terhadap BLT

No	Skor	Penilaian
1	40 – 66	Kurang Tepat
2	67 – 93	Cukup Tepat
3	94 – 120	Sangat Tepat

Hasil dan Pembahasan

Implementasi BLT

Proses penyaluran BLT dinilai adalah salah satu strategi untuk menyukseskan program BLT ini. Sebagaimana tercantum dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyaluran BLT yang dibuat oleh Departemen Sosial RI, dimana di tingkat kabupaten tahap-tahap Program Penyaluran BLT dimulai dengan sosialisasi, verifikasi, penginformasian, pencairan dana, dan terakhir pelaporan kegiatan.

Sebagai suatu program dan kebijakan nasional, program BLT mempunyai latar belakang pelaksanaan yang sistimatis, baik secara deskriptif analisis kondisional maupun deskriptif operasional perundang-undangan. Setelah Pemerintah memutuskan untuk menaikkan BBM, kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi kebijakan turunan dari kebijakan kenaikan BBM tersebut. Kebijakan BLT yang diluncurkan pemerintah ini, menuai banyak protes mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, mahasiswa, dan tokoh-tokoh masyarakat baik nasional maupun daerah. Kebijakan yang sama juga pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2005, ketika pemerintah menaikkan BBM sebesar 126 persen (Sirait 2008).

Sosialisasi program BLT dilaksanakan oleh para perangkat desa yang juga melibatkan para ketua rukun warga dan rukun tetangga untuk membantu menyebarkan rencana pemerintah terkait BLT ini. Sosialisasi dilakukan dengan mendatangi langsung para rumah tangga nelayan sasaran yang dianggap membutuhkan. maka dari itulah sosialisasi sangat melibatkan para ketua rukun tetangga yang notabenehnya sebagai orang yang paling mengetahui secara spesifik kebutuhan warga di sekitar lingkungan rumahnya.

Keberhasilan sosialisasi dinilai jika informasi sampai ke tingkat paling bawah dari sasaran program, yaitu masyarakat penerima BLT. Juga sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, khususnya pada saat ini yaitu mematuhi anjuran pemerintah dengan tertib kepada protokol kesehatan. Adapun muatan sosialisasi dari BLT ini adalah penginformasian bahwa pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan terkait BLT, kemudian menginformasikan BLT secara runut, mulai dari apa itu BLT, bagaimana model program BLT pada masa pandemi sekarang ini, apa kegunaan dan manfaat BLT, serta bagaimana mekanisme penyaluran BLT.

Tahapan berikutnya dari proses implementasi BLT adalah tahapan verifikasi data. Verifikasi data dibutuhkan untuk mengecek relevansi data beserta kenyataan yang sesungguhnya. Verifikasi ini berlaku ketika sudah ditetapkan beberapa calon penerima bantuan langsung tunai. Verifikasi data digunakan untuk memperbaiki data para calon penerima BLT dimana kemungkinan terjadi hal-hal sebagai berikut: (1) Adanya calon penerima BLT yang sudah meninggal, (2) Adanya penerima BLT yang pindah alamat, dan (3) Adanya penerima BLT yang sudah tidak layak, misal sekarang sudah kaya. Jika hal ini terjadi, maka harus ada perbaikan data penerima BLT.

Prosedur verifikasi seperti disampaikan oleh Pejabat kantor desa adalah: Verifikasi data dimaksudkan untuk memperbaiki data penerima BLT, karena data yang digunakan adalah data BPS. Untuk itu desa diharuskan untuk verifikasi data. Misal ditemukan KK sudah meninggal atau

pindah alamat, atau sudah kaya, maka bisa diganti KK lainnya yang lebih berhak untuk mendapatkan BLT. Ketua RT/RW membuat daftar nama usulan RTS pengganti dengan memakai formulir yang telah disiapkan kemudian disahkan dengan membubuhkan tanda tangan dan cap dinas Ketua RW/RT setempat. Dengan catatan, jumlah penggantian harus sama. Artinya jika dicoret lima, maka penggantinya pun tidak boleh lebih dari lima. Hasil pelaksanaan verifikasi harus segera dilaporkan kembali ke para petugas penyalur untuk kemudian di disposisi oleh kepala desa.

Persyaratan pencairan dana BLT adalah dengan hadir sendiri ke tempat pencairan yang ditunjuk, tidak boleh diwakilkan, membawa Kartu BLT dan Kartu Identitas seperti KTP, SIM, dan lainnya. Jika tidak membawa Kartu Identitas, bisa membawa surat keterangan yang sah dari desa/gampong. "Pengambilan dana harus dilakukan sendiri oleh yang diwakilkan, dengan membawa kartu BLT dan KTP atau identitas lain, kalau tidak, ya...tidak bisa ambil dana. Banyak yang datang ke kami tanpa membawa kartu BLT, alasannya kartu hilang atau rusak, tetap tidak bisa kita bayarkan. Tapi kalau yang datang tidak bawa KTP tapi membawa surat keterangan dari desa, bisa kita bayarkan". (Hasil wawancara). Besarnya bantuan yang diterima masyarakat sebesar Rp.300.000 (Sulviana, 2016).

Tahapan selanjutnya atau tahapan akhir dari proses pencairan BLT adalah evaluasi program yang dilakukan oleh para petugas, dimana mereka mengevaluasi seluruh hasil dari penyaluran BLT mulai dari proses penyaluran, hal-hal yang ingin dicapai dari program ini, serta ketepatan sasaran dari BLT tersebut. Tak lupa juga di evaluasi ini sangat di perhatikan faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pelaksanaan program.

Pemberian bantuan terhadap masyarakat miskin merupakan hal yang harus dilakukan pemerintah untuk penentasan masalah kemiskinan agar kesejahteraan masyarakat meningkat namun kenyataan yang terjadi di masyarakat bantuan langsung tunai bukan menjadi jawaban permasalahan kemiskinan di Indonesia. Karena dampak yang ditimbulkan bukan hanya sisi positifnya saja melainkan banyak juga membawa dampak yang negatif sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan langsung tunai itu dianggap belum maksimal dalam membantu perekonomian masyarakat. Pengentasan masalah kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah saja melainkan masyarakat juga punya peran penting dalam hal ini. Masyarakat itu sendiri juga harusnya mampu mengolah atau memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kesejahterannya untuk hidup yang lebih baik.

Agar program BLT dapat menjadi bantuan yang efektif dan efisien, maka diperlukan beberapa langkah, yaitu:

- a) Manajemen penyaluran dana yang baik dan sistematis, agar tercapai tujuan dari program BLT yang sebenarnya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat kecil.
- b) Diperlukan pengawasan terhadap penyaluran dana BLT, karena banyak ditemukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan program BLT tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana.

- c) Bantuan dana langsung tidak diberikan dalam bentuk uang tunai yang diberikan cuma-cuma kepada masyarakat karena dikhawatirkan masyarakat hanya akan bergantung pada BLT, maka bantuan dana langsung direalisasikan dalam bentuk bantuan dana untuk usaha sehingga dari dana tersebut membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat agar tidak menjadi masyarakat yang pemalas karena hanya menggantungkan dari bantuan selain itu dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Persepsi Nelayan terhadap BLT

Ada banyak anggapan masyarakat mengenai BLT ini, sehingga pada penelitian ini dilakukan analisis persepsi masyarakat mengenai BLT melalui beberapa indikator penilaian yaitu; (1) BLT bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan hidup, (2) BLT dijadikan sebagai modal usaha, (3) proses penyaluran BLT, dan (4) ketepatan sasaran penerima BLT.

Manfaat BLT untuk kebutuhan sehari-hari

Tabel 3. Persepsi nelayan mengenai manfaat BLT terhadap kebutuhan hidupnya

No	Indikator	Skor	Jumlah Responden yang memilih	Persentase (%)	Total Skor Penilaian
1	Kurang Bermanfaat	1	3	7,5	3
2	Cukup Bermanfaat	2	13	32,5	26
3	Sangat Bermanfaat	3	24	60	72
	Jumlah		40	100	101

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa skor perhitungan yang didapatkan adalah sebesar 101 dimana berarti berada pada skala indikator sangat penting, artinya masyarakat desa Kalumpangloe Kabupaten Jeneponto memanfaatkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Sementara itu 13 orang responden lainnya mengatakan bahwa BLT yang diberikan pemerintah cukup bermanfaat, dalam artian mereka ternyata menggunakan BLT sebagian untuk memenuhi atau melengkapi kebutuhan hidupnya. Beberapa diantaranya lebih memilih mengaokasikan sebagian BLT sebagai modal usaha, ada juga yang memilih mengalokasikan BLT untuk biaya pendidikan anaknya. Rerata dari 13 orang ini adalah mereka yang tergolong masing memiliki kesanggupan untuk dapat memenuhi sebahagian kebutuhan hidupnya sehingga mereka hanya mengalokasikan sebagian dari BLT, itupun diketahui beberapa mengalokasikannya hanya untuk kebutuhan sandang dan papan yang mendesak.

Sementara sisanya atau rata-rata dari hasil penelitian mengatakan bahwa BLT sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, artinya mereka mengalokasikan keseluruhan dari pencairan BLT ini untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Sebanyak 24 orang responden yang memilih pilihan ini, sebab mereka setelah dilakukan pendekatan mendalam

ditemukan bahwa rerata dari mereka berada pada kondisi yang sangat kurang sejahtera. Kondisi pandemi yang menurunkan produktivitas pasar perikanan menjadi keluhan utama mereka, katanya harga ikan yang turun drastis berpengaruh ke operasional tangkapan mereka sehingga menyebabkan hasil tangkapan dan hasil penjualan tidak optimal sehingga menurunkan pendapatan mereka. Akibatnya pendapatan yang semula digunakan sebagai alat pemuas kebutuhan hidup kini jumlahnya berkurang sehingga muncul ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itulah mereka memilih menggunakan keseluruhan BLT sebagai alat pemuas kebutuhan hidup (papan, sandang papan).

Tabel 4. Manfaat BLT sebagai modal usaha

No	Indikator	Skor	Jumlah Responden yang memilih	Persentase (%)	Total Skor Penilaian
1	Kurang Bermanfaat	1	30	75	30
2	Cukup Bermanfaat	2	9	22,5	18
3	Sangat Bermanfaat	3	1	2,5	3
Jumlah			40	100	51

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa skor perhitungan yang didapatkan adalah sebesar 51 dimana berarti berada pada skala indikator Kurang Bermanfaat , artinya rata-rata masyarakat nelayan desa Kalumpangloe Kabupaten Jeneponto tidak memanfaatkan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai modal untuk mendirikan usaha.

Dari 40 orang responden 1 orang ternyata memilih untuk mengalokasikan BLT yang diperoleh untuk melakukan investasi atau sebagai modal usaha. Ketiga responden ini juga adalah orang yang sama dengan orang yang memilih mengalokasikan BLT yang diperoleh untuk modal usaha ketimbang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan selebihnya yaitu 9 orang adalah mereka yang mengalokasikan sebagian BLT atau sebesar Rp.300.000,- sebagai modal usaha, artinya selebihnya digunakan untuk berbagai kepentingan, ada yang digunakan untuk pendidikan anak ada juga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selebihnya yaitu 30 orang responden adalah mereka yang sama sekali tidak mengalokasikan dana BLT yang diperoleh sebagai modal usaha. Kebanyakan mereka memilih menggunakannya untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Proses Penyaluran BLT

Tabel 5. Persepsi nelayan mengenai proses penyaluran BLT

No	Indikator	Skor	Jumlah Responden yang memilih	Persentase (%)	Total Skor Penilaian
1	Kurang Tepat	1	7	17,5	7
2	Cukup Tepat	2	19	47,5	42
3	Sangat Tepat	3	14	35,0	38
Jumlah			40	100	87

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa skor perhitungan yang didapatkan adalah sebesar 87 dimana berarti berada pada skala indikator Cukup Tepat, artinya bahwa prosess pencairan BLT untuk masyarakat desa Kalumpangloe Kabupaten Jeneponto tidak sesuai dengan waktu perjanjian awal.

Proses implementasi BLT telah dijelaskan pada sub bahasan sebelumnya mengenai langkah-langkah penyaluran BLT yang dilakukan, namun beberapa pandangan masyarakat mengenai ketepatan waktu penyalurannya juga merupakan salah satu poin penting untuk mengukur bagaimana BLT tersebut berlaku di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor perhitungan yang didapatkan adalah sebesar 87 dimana berarti berada pada skala indikator cukup penting, artinya bahwa prosess pencairan BLT untuk masyarakat desa Kalumpangloe Kabupaten Jeneponto tidak sesuai dengan waktu perjanjian awal.

Anggapan masyarakat desa Kalumpangloe Kabupaten Jeneponto terhadap kesesuaian proses penyaluran BLT diperoleh dari hasil perhitungan menggunakan skala likerts adalah tidak sesuai dengan perjanjian awal. Dimana penjabarannya terdiri dari 7 orang yang memilih kurang bermanfaat artinya sebanyak 7 orang beranggapan bahwa proses penyaluran BLT sangat bertele-tele, terlalu banyak persyaratan dan tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan. Diketahui 7 orang ini merupakan peserta penerima BLT yang baru mengurus administrasi dari awal sebab 7 orang penerima sebelumnya di desa ini sudah disesuaikan dengan kriteria, itulah kenapa mereka beranggapan jika persyaratan administrasi terlalu banyak dan sangat bertele-tele prosedur dan prosesnya. Sedangkan 19 orang diantaranya beranggapan bahwa proses penyaluran BLT tidak sesuai dengan jadwal, hal ini dikarenakan mereka terdampak budaya ngaret masyarakat Indonesia sehingga perjanjian pencairan awal yang seharusnya dimulai pukul 9 pagi terkadang tertunda hingga pukul 11 siang. Selebihnya 14 orang responden menyatakan bahwa proses penyaluran BLT ini sudah sangat sesuai dengan prosedur dan tepat waktu sesuai penjadwalan, beberapa diantara mereka adalah para penerima BLT lama.

Ketepatan sasaran penerima BLT

Tabel 6. Persepsi nelayan mengenai ketepatan sasaran penerima BLT

No	Indikator	Skor	Jumlah Responden yang memilih	Persentase (%)	Total Skor Penilaian
1	Kurang Tepat	1	10	25	10
2	Cukup Tepat	2	22	55	44
3	Sangat Tepat	3	8	20	24
	Jumlah		40	100	78

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa skor perhitungan yang didapatkan adalah sebesar 78 dimana berarti berada pada skala indikator cukup tepat, artinya menurut masyarakat Desa Kalumpangloe Kabupaten Jeneponto pemerintah cukup tepat sasaran (Efektif) dalam menerapkan para penerima bantuan langsung tunai.

Anggapan Sophan, dkk (2018) juga sejalan dengan pentingnya ketepatan sasaran penerima BLT yaitu kesalahan dalam mengelompokkan sebuah keluarga ke dalam tingkat kesejahteraan tertentu sering sekali terjadi dan hal tersebut berdampak pada pelaksanaan kebijaksanaan yang tidak tepat kepada sasarnya.

Indikator ini merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk dijadikan sebagai masukan kepada pemerintah mengenai anggapan masyarakat terhadap BLT yang diberikan. Hasil skoring menunjukkan bahwa sebanyak 10 orang responden memilih kurang bermanfaat artinya 10 orang tersebut mengatakan bahwa pemberian BLT ini masih kurang sesuai dengan apa yang ditargetkan pemerintah yaitu masyarakat kurang sejahtera. Mereka beranggapan demikian sebab mereka menganggap masih banyak orang-orang atau rumah tangga kurang sejahtera disekitar mereka yang tidak memperoleh bantuan tersebut yang mana seharusnya bantuan tersebut diberikan secara menyeluruh. Sedangkan yang lainnya yaitu sebanyak 22 orang menyatakan bahwa BLT atau bantuan langsung tunai yang pemerintah berikan ini sudah tepat sasaran karena mereka beranggapan bahwa yang mereka juga tergolong kedalam masyarakat pra sejahtera yang membutuhkan tambahan pendapatan, sudah sesuai dengan sasaran penerima yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan selebihnya yaitu 8 orang memilih indikator sangat bermanfaat yang mana berarti mereka beranggapan jikalau BLT yang diberikan oleh pemerintah ini sudah sangat tepat sasaran atau sudah diberikan untuk keluarga-keluarga yang pra sejahtera.

Pada penelitian ini ada beberapa kelemahan atau masalah-masalah yang di timbulkan oleh kebijakan BLT ini antara lain :

- a. Kebijakan BLT bukan kebijakan yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan kemiskinan di Indonesia, ini dikarenakan kebijakan ini tidak mampu meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin.

- b. Efektifitas dan efisiensi penggunaan dana BLT yang tidak dapat diukur dan diawasi karena lemahnya fungsi pengawasan pemerintah terhadap kebijakan tersebut
- c. Kebijakan BLT memiliki kecenderungan menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat.
- d. Dari sisi keuangan negara, kebijakan BLT merupakan kebijakan yang bersifat menghambur-hamburkan uang negara karena kebijakan tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan secara berkelanjutan dan tidak mampu menstimulus produktifitas masyarakat miskin.

Pengalokasian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam memenuhi Kebutuhan Hidup Nelayan.

Dasar pemberian bantuan langsung tunai di era pandemi covid-19 ini adalah ditemukannya berbagai lapisan masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan sehingga juga mengakibatkan penurunan kesejahteraan. Bantuan langsung tunai (BLT) yang diperoleh nelayan dimanfaatkan untuk dapat menutupi ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup primernya. Dari data persepsi atau pandangan masyarakat yang diperoleh menyatakan bahwa sebanyak 24 orang responden mengatakan bahwa BLT cukup tepat untuk menutupi kebutuhan pokok nya, sedangkan 13 orang lainnya mengatakan bahwa BLT hanya sebagian untuk menutupi kebutuhan hidup mereka dan sisanya 3 orang bahwa BLT tidak dapat menutupi kebutuhan hidupnya. Dibawah ini dapat dilihat model alokasi dana BLT yang diperoleh oleh responden untuk kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan primer berupa Pangan, Pendidikan dan lainnya (bensin). Grafik berikut menunjukkan prioritas pengalokasian BLT yang diperoleh nelayan khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.



Gambar 1. Alokasi BLT Untuk Kebutuhan Hidup

Bantuan dana ini di peroleh dari pemerintah kementerian sosial, kemudian di berikan kepada pemerintah kabupaten dan di data oleh aparat desa setempat, kemudian di data berdasarkan RT/RW masyarakat di Desa Kalumpang Loe Kabupaten Jeneponto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah BLT atau bantuan langsung tunai yang diterima adalah sebesar Rp.300.000 dimana masing-masing rumah tangga berbeda dalam melakukan pengalokasiannya. Dari hasil akumulasi

data yang diperoleh bahwa sebanyak 55% dari seluruh BLT dialokasikan untuk kebutuhan pangan atau kebutuhan makan dan minum sehari-hari, kemudian 8% dari seluruh BLT dialokasikan untuk kebutuhan akan sandang atau pakaian. 4% dialokasikan untuk kebutuhan papan, 17% untuk kebutuhan pendidikan, 14% yang dialokasikan sebagai modal usaha dan 2% dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Dengan ini dapat diketahui bahwa memang prioritas masyarakat nelayan Kalumpangloe adalah untuk kebutuhan primer khususnya kebutuhan akan pangan atau makan dan minum sehari-hari.

Kesimpulan

Implementasi bantuan langsung tunai di Desa Kalumpangloe Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto hampir semua sudah mengenai rumah tangga sasaran tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak tersentuh bantuan hal ini disebabkan karena pendataan yang dilakukan tidak menyentuh semua sasaran rumah tangga miskin dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang program bantuan langsung tunai sehingga banyak masyarakat miskin yang belum tersentuh atau menerima bantuan padahal masyarakat tersebut layak untuk menerima bantuan, kemudian Mekanisme implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dimulai dari tahap sosialisasi, kemudian verifikasi data, kemudian penginformasian, kemudian pencairan dan yang terakhir adalah evaluasi. Adapun Persepsi nelayan Desa Kalumpang Loe Kabupaten Jeneponto diperoleh melalui 4 indikator dimana diketahui bahwa masyarakat desa ini menganggap jika BLT itu sangat bermanfaat sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun tidak digunakan sebagai modal usaha. proses penyaluran BLT tidak sesuai dengan waktu perjanjian serta ketepatan sasaran penerima BLT sudah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan pemerintah. Serta Pengalokasian BLT oleh masyarakat Desa Kalumpangloe adalah sebanyak 55% untuk kebutuhan pangan, 8% untuk kebutuhan sandang, 4% untuk kebutuhan papan, 14% digunakan sebagai modal usaha, 17% digunakan untuk biaya pendidikan anak, serta 2% untuk alokasi lainnya. Dimana besaran pencairan dana BLT adalah Rp.300.000/bulan.

Daftar Pustaka

- Cahyono, S.A. 2010. Dampak Bantuan Langsung Tunai dan Investasi Sumberdaya Manusia Terhadap Ekonomi Rumah Tangga Sekitar Hutan Pinus di Desa Samagede. *Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan*, Vol 7, No.2:101-114.
- Dyah, N.R.P.A., Nugroho, E., & Aribowo, E. 2008. Sistem Penentuan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dengan Metode. *Jurnal Informatika*, Vol2, No.2:220-227.
- Harlianingtyas, I., Kusriani, D.I., Susilaningrum, S. 2013. Pemodelan Partisipasi Wanita dalam Kegiatan Ekonomi Rumah Tangga Nelayan di Pesisir Timur Surabaya (Studi Kasus Kecamatan Kecamatan Bulak, Mulyorejo, dan Kenjeran). *Jurnal Sains dan Seni POMITS* vol 2, no.1:1-6.
- Hasbii, I., 2008. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus. *Jurnal Ilmu Administrasi Konsentrasi : Magister Administrasi Publik*.

- Iping, B. 2020. Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial. Jurnal
- Kusnadi, D., K. 2002. Konflik Sosial Nelayan : Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan. Lkis Yogyakarta : 4-10.
- Maun, C.E.F., 2020. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak COVID-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Ilmu Pemerintahan FISIP UNTAD.
- Pratama, S.B., & Saputra, I.D.G.S. 2019. Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Minat Menggunakan Uang Elektronik. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana vol27, no2 :927-953.
- Retnowati, E. 2011. Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum). Jurnal Perspektif, Vol16, No.3:149-159.
- Saleh, N., A. 2019. Perubahan Sosial Budaya Komunitas Nelayan Pesisir: Dari Nelayan Ke Petani Rumput Laut (Studi Kasus Budi Daya Rumput Laut di Kelurahan Pakbiringa, Kabupaten Jeneponto). Jurnal Walasuji vol 10, no.2:234-235.
- Simbolon, M. 2008. Persepsi dan Kepribadian, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol2, No.1:52-66.
- Saleh, N., A. 2019. Perubahan Sosial Budaya Komunitas Nelayan Pesisir: Dari Nelayan Ke Petani Rumput Laut (Studi Kasus Budi Daya Rumput Laut di Kelurahan Pakbiringa, Kabupaten Jeneponto). Jurnal Walasuji vol 10, no.2:234-235.
- Sopahan, M.K., Putro,S.S., & Musyarofah. 2018. Uji Akurasi Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Masyarakat Nelayan Pesisir Pengaruh Kenaikan Harga Bbm Dengan Menggunakan Metode Ahp (Analytical Hierarchy Process. Jurnal Ilmiah Edutic, Vol4, No.2:12-22.
- Sudirman. 2019. Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Bantuan Langsung Tunai di Desa Alo'o dan Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong (Studi Kasus Desa Pegunungan dan Desa Pesisir). E-Jurnal Katalogis, Vol 2, No.7:132-139.